

Persepsi mahasiswa FIS UNP terhadap dinasti politik keluarga mantan presiden

Fadil Akbar, Suryanef, Hasrul, Irwan Hamdi

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FIS Universitas Negeri Padang

Co-Author: **Suryanef**

E-mail: suryanef@fis.unp.ac.id

ABSTRAK

Fenomena dinasti politik di Indonesia semakin mengemuka, terutama menjelang Pemilu 2024 dengan keterlibatan keluarga mantan Presiden Joko Widodo dalam berbagai posisi strategis. Dinasti politik dinilai bertentangan dengan prinsip demokrasi dan meritokrasi karena lebih menekankan pada hubungan kekerabatan dibanding kompetensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persepsi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang terhadap dinasti politik keluarga Presiden Joko Widodo. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif melalui survei dengan angket tertutup dan terbuka. Sampel berjumlah 200 mahasiswa dari berbagai program studi dipilih menggunakan teknik *proportional random sampling*. Analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif dengan bantuan perangkat lunak statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa memiliki persepsi negatif terhadap dinasti politik keluarga mantan Presiden Joko Widodo, dengan rata-rata skor 71,2% dengan kategori tidak setuju. Persepsi negatif paling tinggi terlihat pada indikator sikap sebesar 77,6%. Temuan ini mengindikasikan adanya kekhawatiran mahasiswa terhadap dampak dinasti politik yang berpotensi memperkuat sistem oligarki karena lebih mementingkan kepentingan keluarga daripada kepentingan bersama, membatasi atau menghambat kesempatan akses politik bagi calon pemimpin baru, serta berimplikasi pada kemerosotan pelaksanaan prinsip demokrasi dalam politik Indonesia.

Kata Kunci: *dinasti politik, persepsi politik, demokrasi, meritokrasi*

ABSTRACT

The phenomenon of political dynasties in Indonesia is increasingly prominent, especially ahead of the 2024 Election with the involvement of former President Joko Widodo's family in various strategic positions. Political dynasties are considered to be contrary to the principles of democracy and meritocracy because they emphasize kinship relations rather than competence. This study aims to examine the perceptions of students of the Faculty of Social Sciences, Padang State University, towards the political dynasty of President Joko Widodo's family. The method used is a descriptive quantitative approach through a survey with closed and open questionnaires. A sample of 200 students from various study programs was selected using the *proportional random sampling* technique. Data analysis was carried out descriptively quantitatively with the help of statistical

software. The results showed that the majority of students had a negative perception of the political dynasty of former President Joko Widodo's family, with an average score of 71.2% in the disagree category. The highest negative perception was seen in the attitude indicator at 77.6%. This finding indicates that students are concerned about the impact of political dynasties that have the potential to strengthen the oligarchic system because they prioritize family interests over common interests, limit or hinder opportunities for political access for new leader candidates, and have implications for the decline in the implementation of democratic principles in Indonesian politics.

Keywords: political dynasty, political perception, democracy, meritocracy



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2025 by author.

PENDAHULUAN

Fenomena dinasti politik merupakan isu penting dalam kajian politik kontemporer di Indonesia. Sejak era reformasi, demokrasi Indonesia menghadapi berbagai tantangan, seperti polarisasi politik, politik identitas, dan politik uang. Salah satu tantangan signifikan yang mengemuka adalah praktik pewarisan kekuasaan dalam lingkup keluarga atau yang dikenal sebagai dinasti politik. Praktik ini tidak hanya mengancam prinsip meritokrasi, tetapi juga berpotensi memperlemah kualitas demokrasi yang sehat dan berkeadilan (Panggabean, 2024).

Politik, sebagaimana dinyatakan oleh Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan dalam *Power and Society*, merupakan studi tentang siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana. Kekuasaan dalam politik merupakan bentuk pengaruh yang bisa diwariskan melalui jalur darah, sebagaimana terjadi dalam konteks dinasti politik (Budiardjo, 2008). Dalam hal ini, status ascribed menjadi dominan, yang berarti seseorang memperoleh posisi atau jabatan bukan karena kompetensi, tetapi karena hubungan kekerabatan. Marcus Mietzner dalam (Nur Fadilah, 2022) menekankan bahwa kecenderungan populisme dan munculnya dinasti keluarga dalam kontestasi elektoral telah menjadi bagian dari konsolidasi sistem kepartaian di Indonesia.

Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara lain seperti Filipina, yang selama lebih dari setengah abad dipimpin oleh figur dari keluarga besar yang sama (Evangelio, 2015). Penelitian Evangelio menunjukkan bahwa dinasti politik kerap diterima masyarakat sebagai hal wajar, meskipun belum tentu menunjukkan keberhasilan dalam pembangunan daerah. Salah satu kasus mencolok adalah dinasti politik Ratu Atut di Provinsi Banten, yang melibatkan anggota keluarga dalam berbagai jabatan strategis. Fenomena ini diperkuat oleh data (Rahma dkk, 2022), yang mencatat terdapat 57 kepala daerah di 15 provinsi yang memiliki hubungan kekerabatan.

Kendati praktik ini sempat dilarang melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 2015, Mahkamah Konstitusi membatalkan larangan tersebut melalui Putusan No. 33/PUU-XIII/2015, dengan alasan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara (Novryansyah, 2022).

Isu ini kembali memanas dengan munculnya keluarga Presiden Joko Widodo dalam konstelasi politik nasional. Gibran Rakabuming Raka terpilih sebagai Wali Kota Surakarta dan kemudian sebagai Wakil Presiden pada Pemilu 2024. Bobby Nasution menjadi Wali Kota Medan dan Kaesang Pangarep mendadak menjadi Ketua Umum PSI. Fenomena ini memicu kritik keras dari para akademisi. Prof. Dr. Saiful Mujani, M.A. dalam (Narasi, 2023) menyebutkan bahwa praktik ini mencederai demokrasi dan mencerminkan model pemerintahan ala Orde Baru. Sementara itu, Dr. Lusi Andriyani, M.Si. menyatakan bahwa dinasti politik bisa diterima selama diikuti oleh kompetensi, namun tetap diperlukan kontrol publik dan kelembagaan (UMJ, 2023).

Pandangan publik terhadap dinasti politik keluarga Presiden Joko Widodo pun beragam, Isu ini menjadi penting untuk dikaji lebih dalam, terutama dari perspektif mahasiswa sebagai agen perubahan dan pemilik masa depan demokrasi Indonesia. Persepsi mahasiswa terhadap isu ini merupakan cerminan dari kesadaran politik yang terbentuk dari pengalaman, latar belakang, dan pemahaman mereka terhadap dinamika politik nasional (Suryono, 2018). Penelitian ini berupaya menggambarkan dan memetakan persepsi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang terhadap praktik dinasti politik yang dilakukan oleh keluarga Presiden Joko Widodo. Penelitian ini penting karena pertama, keterlibatan aktif Gibran, Kaesang, dan Bobby dalam kontestasi politik mencerminkan pola dinasti kekuasaan. Kedua, perubahan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden yang dinilai sarat konflik kepentingan. Ketiga, fenomena ini menimbulkan kekhawatiran akan meningkatnya risiko KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi politik di Indonesia, khususnya dalam memahami bagaimana persepsi generasi muda terhadap isu dinasti politik dapat membentuk arah demokrasi ke depan. Penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi bagi pemangku kebijakan dan masyarakat dalam merumuskan strategi untuk memperkuat demokrasi yang lebih adil dan meritokratis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk mengetahui persepsi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang terhadap dinasti politik keluarga mantan Presiden Joko Widodo. Desain penelitian yang digunakan bersifat survei dengan menggunakan instrumen angket tertutup dan terbuka sebagai alat pengumpulan data. Alasan penggunaan instrumen angket

tertutup ini adalah untuk memperoleh data yang dapat diukur dan dianalisis secara statistik, guna melihat kecenderungan dan distribusi persepsi responden terhadap fenomena dinasti politik sedangkan Alasan penggunaan instrumen angket terbuka untuk mendapatkan argumen atau persepsi langsung dari responden serta memperkuat data mengenai persepsi mahasiswa (Sugiyono,2019).

Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif dari berbagai program studi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, dengan jumlah sampel sebanyak 200 responden yang diambil melalui teknik proportional random sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif, untuk melihat frekuensi, persentase, dan kecenderungan jawaban responden. Metode ini dipilih karena sesuai untuk menggambarkan persepsi umum mahasiswa secara objektif dan menyeluruh terhadap kasus dinasti politik yang berkembang di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Responden terhadap dinasti politik mantan presiden Joko Widodo

Penelitian ini menelusuri persepsi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang mengenai dinasti politik, mencakup pengetahuan, sikap, dan kesadaran terhadap dampak fenomena tersebut. Secara umum, mahasiswa memiliki pandangan kritis terhadap praktik pewarisan kekuasaan dalam keluarga, khususnya yang berpotensi mengancam demokrasi. Temuan data berikut menggambarkan distribusi pemahaman mereka terkait konsep dinasti politik.

Tabel 1. Konsep Dinasti Politik

No	Pernyataan	Jumlah	Persentase
1	Dinasti politik adalah suatu sistem pewarisan kekuasaan dalam keluarga yang dapat menjamin kesinambungan kebijakan dan stabilitas pemerintahan.	14	7%
2	Praktik politik yang melibatkan anggota keluarga yang sama dalam berbagai jabatan pemerintahan yang tidak bertentangan dengan demokrasi jika pemimpin yang terpilih tetap melalui proses pemilu yang adil dan transparan.	36	18%
3	Fenomena politik di mana individu dari keluarga tertentu memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan yang dapat menghambat demokrasi karena mempersempit peluang bagi calon lain.	53	26,5%
4	Dinasti politik adalah suatu sistem pewarisan kekuasaan yang dapat membuka peluang nepotisme dan korupsi, karena penguasa cenderung memprioritaskan kepentingan	97	48,5%

keluarganya dibanding kepentingan rakyat.

Jumlah	200	100%
---------------	------------	-------------

Sumber: Diolah dari data primer

Mayoritas responden (48,5%) menilai dinasti politik membuka peluang nepotisme dan korupsi, disusul 26,5% yang menilai menghambat demokrasi. Sebanyak 18% masih menerima fenomena ini selama proses pemilu berlangsung adil, dan 7% melihatnya sebagai jaminan stabilitas. Temuan ini menunjukkan dominasi persepsi negatif, namun tetap ada kelompok kecil yang memandangnya positif. Data tersebut diperkuat dengan argumen responden mengenai makna dari dinasti politik dimana Dinasti politik dipahami sebagai dominasi kekuasaan oleh satu keluarga secara turun-temurun, baik melalui hubungan darah maupun pernikahan. Responden menilai praktik ini menghambat kompetisi politik yang sehat, membuka peluang nepotisme, dan bertentangan dengan prinsip demokrasi seperti keterbukaan dan meritokrasi, bahkan dianggap menyerupai sistem monarki. Pengetahuan mahasiswa terhadap fenomena dinasti politik di Indonesia menunjukkan tingkat kesadaran politik yang tinggi, mayoritas telah mengetahui praktik tersebut bahkan sebelum mencuatnya isu keluarga Presiden Joko Widodo, dan sebagian lainnya baru menyadari karena kasus tersebut, sebagaimana tergambar pada Tabel 2.

Tabel 2. Pengetahuan mengenai Dinasti Politik di Indonesia

No	Pernyataan	Jumlah	Persentase
1	Mengetahui dinasti politik di Indonesia	157	78,5%
2	Baru mengetahui dinasti politik karena keluarga Joko Widodo	34	17%
3	Tidak mengetahui dinasti politik di Indonesia	0	0%
4	Tidak yakin atau tidak memiliki pendapat	9	4,5%
Jumlah		200	100%

Sumber: Diolah dari data primer

Sebanyak 78,5% responden sudah mengetahui tentang dinasti politik, 17% baru sadar karena keluarga Presiden Jokowi, dan hanya 4,5% tidak yakin atau tidak punya pendapat. Tak ada yang benar-benar tidak tahu, menunjukkan tingkat literasi politik cukup tinggi. Dinasti politik yang dikenal responden antara lain berasal dari keluarga Soekarno, Soeharto, SBY, Jokowi, hingga tokoh daerah seperti Mahyeldi dan Epyardi Asda. Persepsi mahasiswa terhadap kewajaran dinasti politik dalam sistem demokrasi Indonesia menunjukkan kecenderungan penolakan yang kuat, mencerminkan pandangan kritis terhadap praktik pewarisan kekuasaan dalam keluarga yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip demokrasi, sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Kewajaran Praktik Dinasti Politik

No	Pernyataan	Jumlah	Persentase
1	Sangat Tidak Setuju terhadap dinasti politik dalam konteks demokrasi	79	39,5%
2	Tidak Setuju terhadap dinasti politik dalam konteks demokrasi	58	29%
3	Setuju terhadap dinasti politik dalam konteks demokrasi	37	18,5%
4	Sangat Setuju terhadap dinasti politik dalam konteks demokrasi	26	13%
Jumlah		200	100%

Sumber: Diolah dari data primer

Sebanyak 68,5% responden menolak kewajaran dinasti politik dalam demokrasi, mencerminkan penilaian bahwa praktik tersebut membatasi kesempatan dan menyalahi semangat meritokrasi. Hanya sebagian kecil (31,5%) yang setuju, dengan argumen bahwa proses pemilu demokratis tetap dapat membenarkan keterlibatan keluarga politik. Meski begitu, mayoritas tetap memandang bahwa dinasti politik berpotensi memperkuat nepotisme dan mengurangi transparansi dalam sistem politik Indonesia. Persepsi mahasiswa terhadap dugaan penggunaan segala cara oleh Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan dinasti politik melalui anak-anaknya menunjukkan kecenderungan persetujuan yang cukup dominan, menggambarkan sikap kritis terhadap dinamika kekuasaan dalam keluarga elite politik, sebagaimana tercermin pada Tabel 4.

Tabel 4. Pandangan Mengenai mantan Presiden Joko Widodo Menggunakan Segala Cara untuk melanjutkan dinasti

No	Pernyataan	Jumlah	Persentase
1	Sangat Tidak Setuju dengan kalimat Joko Widodo Menggunakan Segala cara untuk melanjutkan dinasti	12	6%
2	Tidak Setuju dengan kalimat Joko Widodo Menggunakan Segala cara untuk melanjutkan dinasti	34	17%
3	Setuju bahwa Joko Widodo Menggunakan Segala cara untuk melanjutkan dinasti	63	31,5%
4	Sangat Setuju bahwa Joko Widodo Menggunakan Segala cara untuk melanjutkan dinasti	91	45,5%
Jumlah		200	100%

Sumber: Diolah dari data primer

Sebagian besar responden (77%) menyetujui bahwa keluarga Presiden Joko Widodo menggunakan segala cara untuk memperluas pengaruh politiknya, didukung argumen terkait peran Mahkamah Konstitusi dan dominasi akses kekuasaan. Sementara itu, 23% lainnya menilai setiap warga negara berhak terlibat politik asalkan memenuhi

aturan, menekankan pentingnya objektivitas dalam menilai proses demokrasi. Data ini menunjukkan polarisasi persepsi yang kuat terhadap praktik politik dinasti di tingkat nasional. Pandangan mahasiswa terhadap keterlibatan anak dan menantu Presiden Joko Widodo dalam dunia politik menunjukkan adanya kecenderungan sikap kritis, khususnya terhadap aspek hukum dan etika yang melatarbelakangi pencalonan mereka, sebagaimana dirangkum dalam Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Pandangan terhadap keterlibatan Anak Mantan Presiden Joko Widodo dalam politik

No	Pernyataan	Jumlah	Persentase
1	Keterlibatan generasi muda perlu didukung, Gibran, Kaesang dan Bobby sebagai pemimpin muda	34	17%
2	Gibran, Kaesang dan Bobby memiliki pengalaman sebagai modal kepemimpinan nasional	15	7,5%
3	Pencalonannya menuai kontroversi hukum dan etika, terutama soal putusan MK	84	42%
4	Pencalonan mereka dianggap melanggar prinsip demokrasi karena potensi konflik kepentingan	67	33,5%
Jumlah		200	100%

Sumber: Diolah dari data primer

Sebanyak 75,5% responden memiliki pandangan kritis terhadap keterlibatan keluarga Jokowi, dengan fokus pada kontroversi hukum dan etika serta pelanggaran prinsip demokrasi. Hanya 24,5% yang memandang positif dengan menekankan pentingnya regenerasi dan pengalaman politik mereka. Temuan ini memperkuat persepsi bahwa dinasti politik menimbulkan kekhawatiran terhadap netralitas hukum dan kualitas demokrasi di Indonesia. Pandangan responden terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah batas usia capres dan cawapres menunjukkan penolakan signifikan, mencerminkan kekhawatiran akan praktik nepotisme dan pelemahan prinsip demokrasi, sebagaimana terlihat dalam Tabel 6.

Tabel 6. Pandangan Responden atas keputusan Mahkamah Konstitusi

No	Pernyataan	Jumlah	Persentase
1	Sangat Tidak Setuju dengan Putusan MK	104	52%
2	Tidak Setuju dengan Putusan MK	53	26,5%
3	Setuju dengan Putusan MK	29	14,5%
4	Sangat Setuju dengan Putusan MK	14	7%
Jumlah		200	100%

Sumber: Diolah dari data primer

Sebagian besar responden (78,5%) menolak keputusan MK, menilai bahwa putusan tersebut sarat konflik kepentingan karena keterkaitan keluarga antara Ketua MK dan Gibran. Hanya 21,5% yang setuju, dengan alasan mendukung regenerasi politik. Temuan ini menunjukkan kuatnya kritik terhadap independensi lembaga yudikatif serta kekhawatiran akan meluasnya praktik dinasti dalam politik nasional. Pandangan mahasiswa terhadap dampak dinasti politik menunjukkan kecenderungan kuat bahwa praktik ini lebih mengutamakan kepentingan keluarga daripada kepentingan publik, sebagaimana tergambar dalam Tabel 7 berikut.

Tabel 7. Dinasti Politik Mementingkan Kepentingan Keluarga

No	Pernyataan	Jumlah	Persentase
1	Sangat Tidak Setuju dinasti politik lebih mementingkan kepentingan keluarga	10	5%
2	Tidak Setuju dinasti politik lebih mementingkan kepentingan keluarga	34	17%
3	Setuju dinasti politik lebih mementingkan kepentingan keluarga	70	35%
4	Sangat Setuju dinasti politik lebih mementingkan kepentingan keluarga	86	43%
Jumlah		200	100%

Sumber: Diolah dari data primer

Sebanyak 78% responden setuju bahwa dinasti politik cenderung mengutamakan kepentingan keluarga, memperlihatkan kekhawatiran akan dominasi kekuasaan yang berorientasi pada keuntungan pribadi. Responden menilai praktik ini berdampak pada penyalahgunaan dana publik dan keputusan politik yang bias terhadap jaringan keluarga. Walau terdapat sebagian kecil yang menilai tidak semua dinasti bersifat negatif, mayoritas tetap melihat bahwa kepentingan rakyat seringkali terpinggirkan dalam sistem politik semacam ini. Persepsi mahasiswa terhadap dampak dinasti politik dalam menghambat peluang pemimpin baru yang lebih kompeten menunjukkan dominasi sikap kritis, yang tercermin dalam Tabel 8 berikut.

Tabel 8. Dinasti Politik Menghambat Kesempatan bagi Calon Pemimpin Baru

No	Pernyataan	Jumlah	Persentase
1	Sangat Tidak Setuju	14	7%
2	Tidak Setuju	34	17%
3	Setuju	68	34%
4	Sangat Setuju	84	42%
Jumlah		200	100%

Sumber: Diolah dari data primer

Sebanyak 76% responden setuju bahwa dinasti politik menghambat calon pemimpin baru yang lebih berkualitas, menyoroti akses eksklusif keluarga dinasti terhadap sumber daya politik dan

finansial. Kondisi ini dinilai mempersempit ruang kompetisi bagi tokoh-tokoh muda yang potensial. Walau ada responden yang percaya pemimpin berkualitas tetap bisa muncul lewat dukungan publik, mayoritas tetap menganggap politik dinasti sebagai hambatan serius terhadap regenerasi kepemimpinan yang sehat. Pandangan responden terhadap implikasi dinasti politik terhadap prinsip-prinsip demokrasi mengindikasikan kecenderungan kuat terhadap sikap negatif, terutama dalam aspek transparansi, partisipasi, dan persaingan politik yang sehat, sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 9.

Tabel 9. Dinasti Politik Dapat Menurunkan Prinsip Demokrasi

No	Pernyataan	Jumlah	Persentase
1	Sangat Tidak Setuju	14	7%
2	Tidak Setuju	27	13,5%
3	Setuju	77	38,5%
4	Sangat Setuju	82	41%
Jumlah		200	100%

Sumber: Diolah dari data primer

Sebanyak 79,5% responden menilai dinasti politik melemahkan prinsip demokrasi, karena dinilai mengurangi transparansi, menghambat partisipasi inklusif, serta menciptakan persaingan politik yang tidak adil. Konsentrasi kekuasaan dalam satu keluarga dianggap memicu penyalahgunaan wewenang dan mengaburkan akuntabilitas publik. Meskipun ada yang berpandangan netral, mayoritas responden tetap menilai dominasi politik keluarga sebagai ancaman terhadap nilai dasar demokrasi. Pandangan mahasiswa terhadap politik dinasti yang dianggap melahirkan pemimpin tidak berkompeten namun tetap berkuasa menunjukkan respons dominan yang bersifat kritis, sebagaimana dirangkum dalam Tabel 10 berikut.

Tabel 10. Dinasti Politik Menciptakan Pemimpin Yang Tidak Berkompeten

No	Pernyataan	Jumlah	Persentase
1	Sangat Tidak Setuju	19	9,5%
2	Tidak Setuju	34	17%
3	Setuju	80	40%
4	Sangat Setuju	67	33,5%
Jumlah		200	100%

Sumber: Diolah dari data primer

Sebanyak 73,5% responden menyatakan setuju bahwa politik dinasti melahirkan pemimpin yang tidak berkompeten namun tetap berkuasa karena latar belakang keluarga, bukan karena kemampuan. Responden menyoroti minimnya pengalaman tokoh-tokoh politik dari keluarga penguasa, seperti Gibran dan Bobby, yang dinilai belum cukup matang secara politik namun mendapat posisi strategis.

Meskipun ada pandangan bahwa kompetensi seharusnya diukur secara objektif, mayoritas tetap menganggap bahwa dinasti politik lebih banyak mengandalkan koneksi daripada kapasitas kepemimpinan. Pandangan mahasiswa terhadap anggapan bahwa dinasti politik merupakan cara utama untuk meneruskan visi dan misi kepemimpinan sebelumnya cenderung negatif, sebagaimana terlihat pada Tabel 11 berikut.

Tabel 11. Dinasti Politik Sebagai cara Meneruskan Visi dan Misi Pemimpin Sebelumnya

No	Pernyataan	Jumlah	Persentase
1	Sangat Tidak Setuju	86	43%
2	Tidak Setuju	71	35,5%
3	Setuju	31	15,5%
4	Sangat Setuju	12	6%
Jumlah		200	100%

Sumber: Diolah dari data primer

Sebanyak 78,5% responden tidak setuju bahwa dinasti politik diperlukan untuk melanjutkan visi dan misi pemimpin sebelumnya. Mereka menilai bahwa keberlanjutan program dapat dijamin oleh pemimpin yang kompeten dan dipilih secara demokratis, bukan semata karena hubungan keluarga. Seperti Anies Baswedan digunakan responden untuk menunjukkan bahwa regenerasi kepemimpinan tidak harus melalui jalur dinasti. Hal ini menegaskan pentingnya kelembagaan dan sistem demokrasi yang sehat dalam menjaga keberlanjutan pembangunan. Pandangan responden mengenai pentingnya menilai kualitas pemimpin berdasarkan kompetensi daripada latar belakang keluarga menunjukkan dominasi sikap rasional dan meritokratis sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 12.

Tabel 12. Sikap Akan Pentingnya Kualitas Dari Pada Latar Belakang Keluarga

No	Pernyataan	Jumlah	Persentase
1	Kualitas pemimpin diukur dari kompetensi, rekam jejak, dan visi misi, bukan latar belakang keluarga	111	55,5%
2	Kualitas pemimpin diukur dari kompetensi, rekam jejak, dan visi misi, bukan latar belakang keluarga	51	25,5%
3	Kualitas pemimpin diukur dari kompetensi, rekam jejak, dan visi misi, bukan latar belakang keluarga	20	10%
4	Keluarga dengan sejarah kepemimpinan baik mungkin lebih siap melanjutkan kebijakan yang ada	18	9%
Jumlah		200	100%

Sumber: Diolah dari data primer

Sebanyak 81% responden sepakat bahwa kompetensi, rekam jejak, dan visi misi merupakan indikator utama dalam menilai kualitas seorang pemimpin, bukan faktor keturunan. Hanya 9% yang berpandangan bahwa keberlanjutan kepemimpinan dalam keluarga dapat menjamin kesiapan dalam melanjutkan kebijakan. Temuan ini mengindikasikan bahwa mahasiswa lebih memilih pemimpin yang memiliki kapasitas dibanding yang hanya mengandalkan nama besar keluarga. Pandangan mahasiswa terhadap dampak dinasti politik yang ditumbuhkan oleh mantan Presiden Joko Widodo menunjukkan dominasi sikap kritis, terutama terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan dan gangguan terhadap netralitas pemilu, sebagaimana terlihat dalam Tabel 13.

Tabel 13. Pandangan Responden Terhadap Dampak Dinasti Politik Saat Ini

No	Pernyataan	Jumlah	Persentase
1	Keterlibatan keluarga Joko Widodo menunjukkan kepercayaan masyarakat	19	9,5%
2	Pencalonan keluarga Joko Widodo memperkuat kebijakan pemerintahan sebelumnya	9	4,5%
3	Pencalonan keluarga Joko Widodo wajar dalam sistem politik demokratis	20	10%
4	Dominasi satu keluarga dalam politik dapat memicu ketidakpuasan masyarakat	61	30,5%
5	Keterlibatan keluarga Joko Widodo dapat memengaruhi netralitas penyelenggara pemilu	91	45,5%
Jumlah		200	100%

Sumber: Diolah dari data primer

Sebanyak 76% responden mengekspresikan pandangan negatif, dengan fokus pada kekhawatiran terhadap netralitas pemilu dan dominasi kekuasaan dalam satu keluarga. Hanya sebagian kecil yang menilai positif keterlibatan keluarga Joko Widodo, baik sebagai cerminan kepercayaan publik maupun kelanjutan kebijakan. Secara umum, data ini mengindikasikan bahwa mahasiswa menaruh perhatian serius terhadap bahaya konsentrasi kekuasaan politik dan dampaknya terhadap integritas demokrasi. Pandangan responden terhadap peran generasi muda dalam mengkritisi dan mengawasi keberlanjutan dinasti politik menunjukkan dukungan yang sangat kuat, sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 14 berikut.

Tabel 14. Peran Generasi Muda dalam Mengkritisi dan Mengawasi Dinasti Politik

No	Pernyataan	Jumlah	Persentase
1	Sangat Tidak Setuju	3	1,5%
2	Tidak Setuju	5	2,5%
3	Setuju	66	33%

4	Sangat Setuju	126	63%
Jumlah		200	100%

Sumber: Diolah dari data primer

Sebanyak 96% responden menyetujui bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam mengkritisi dan mengawasi keberlanjutan politik dinasti. Generasi muda dianggap sebagai agen perubahan yang kritis, idealis, dan memiliki akses luas terhadap informasi, sehingga mampu mendorong sistem politik yang lebih adil dan transparan. Dukungan besar ini mencerminkan optimisme terhadap potensi peran aktif generasi muda dalam menjaga integritas demokrasi dan memastikan lahirnya kepemimpinan yang kompeten. Persepsi mahasiswa jika mereka berada dalam posisi sebagai anak politisi menunjukkan beragam sikap terhadap pemanfaatan privilese politik, dengan kecenderungan untuk memilih jalur mandiri, sebagaimana tergambar dalam Tabel 15 berikut.

Tabel 15. Perilaku Responden Jika Menjadi Salah Satu Anak Politisi

No	Pernyataan	Jumlah	Persentase
1	Memanfaatkan privilese orang tua untuk menjadi politisi atau pekerjaan lain	37	18,5%
2	Menggunakan pengalaman keluarga sebagai bekal menjadi pemimpin hebat	53	26,5%
3	Membangun karier politik sendiri tanpa bergantung pada nama keluarga	75	37,5%
4	Menolak terlibat dalam politik dan memilih jalur karier lain	35	17,5%
Jumlah		200	100%

Sumber: Diolah dari data primer

Sebanyak 37,5% responden memilih membangun karier politik secara mandiri tanpa mengandalkan nama keluarga, menunjukkan sikap meritokratis. Sementara 26,5% memanfaatkan pengalaman keluarga untuk membangun kepemimpinan. Sebagian kecil (18,5%) memilih memanfaatkan privilese, dan 17,5% lainnya menolak terlibat dalam politik sama sekali. Temuan ini mencerminkan adanya preferensi kuat terhadap jalur politik yang mandiri dan etis di kalangan mahasiswa. Berdasarkan data yang diperoleh, mayoritas responden menunjukkan sikap tidak simpatik terhadap dinamika dinasti politik keluarga Joko Widodo. Sebanyak 69% responden tidak simpatik, mencerminkan penolakan atau ketidaksetujuan terhadap keberlanjutan dinasti politik ini. Hal ini menunjukkan kekhawatiran terhadap potensi munculnya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) akibat konsentrasi kekuasaan dalam satu keluarga, serta potensi terbatasnya peluang bagi pemimpin baru yang lebih kompeten. Meskipun demikian, 8,5% responden masih menunjukkan sikap simpatik, dengan alasan rekam jejak positif keluarga Joko Widodo yang dianggap dapat memberikan stabilitas dan perubahan positif

dalam pemerintahan jika dijalankan secara demokratis. Sebagian kecil lainnya, sekitar 20,5%, memilih bersikap netral, melihat dinamika ini sebagai bagian dari proses politik yang wajar tanpa dukungan atau penolakan yang berlebihan. Mereka menganggap bahwa meskipun dinasti politik berpotensi negatif, mereka memilih untuk bersikap objektif dan tidak terjebak dalam pandangan yang terlalu bias.

Tabel 16 Prilaku Responden Terhadap Dinamika Dinasti Keluarga Joko Widodo

No.	Pernyataan	Jumlah	Persentase
1	Simpatik (mendukung)	17	8,5%
2	Tidak simpatik (tidak mendukung)	138	69%
3	Netral, tidak mendukung maupun menolak	41	20,5%
4	Tidak tahu atau tidak memiliki pendapat mengenai hal ini	4	2%
JUMLAH		200	100%

Sumber: Diolah dari data primer

Secara keseluruhan, data menunjukkan dominasi ketidaksetujuan terhadap praktik dinasti politik, meskipun terdapat sebagian kecil responden yang simpatik atau netral. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ada kekhawatiran terkait potensi dampak negatif, ada pula pandangan yang memberikan ruang untuk penilaian positif atau netral terhadap keberlanjutan dinasti politik ini.

Aspek Pengetahuan, Sikap dan Kesadaran responden

a. Pengetahuan

Pada aspek pengetahuan, penelitian ini mengukur tingkat pengetahuan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang terhadap fenomena dinasti politik keluarga mantan Presiden Joko Widodo. Pengetahuan dalam konteks psikologi merupakan hasil dari proses kognitif yang melibatkan pengolahan informasi, pemahaman, serta pemaknaan terhadap suatu objek atau peristiwa. Dalam konteks ini, pengetahuan mahasiswa tentang dinasti politik terbentuk melalui pengalaman empiris, baik melalui indera penglihatan maupun pendengaran, serta akses terhadap berbagai sumber informasi seperti media massa, diskusi akademik, dan pengalaman pribadi. (Bimo Walgito, 2004),

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden memiliki pemahaman yang cukup terhadap konsep dinasti politik. Tabel 17 menunjukkan hasil pengolahan data yang mencakup empat item pernyataan terkait pandangan responden terhadap dinasti politik. Secara keseluruhan, tingkat pengetahuan responden berada pada angka 74%, yang termasuk dalam kategori Tidak Setuju. Responden menunjukkan sikap kritis terhadap praktik dinasti politik, dengan sebagian besar merasa bahwa hal tersebut dapat mengganggu prinsip-prinsip demokrasi. Temuan ini

menunjukkan bahwa responden menganggap praktik dinasti politik keluarga Joko Widodo sebagai politik yang tidak sehat dan berpotensi merugikan demokrasi, meskipun belum sepenuhnya menolaknya.

Tabel 17 item-item pengetahuan

No. item	Pernyataan	Nilai (%)	Kategori	Keterangan
1	Pandangan Responden terhadap Konsep atau pengertian Dinasti Politik	75%	Tidak Setuju	Responden memahami konsep dinasti politik dan cenderung kritis
3	Pandangan Responden terhadap kewajaran dinasti politik dalam praktik demokrasi di Indonesia	68,5%	Tidak Setuju	Responden menilai dinasti politik tidak wajar dalam demokrasi
4	Pandangan Responden mengenai keluarga Joko Widodo yang menggunakan segala cara untuk mendapatkan jabatan	77%	Sangat Tidak Setuju	Responden percaya praktik dinasti politik adalah politik yang tidak sehat
5	Pandangan Responden melihat anak dan menantu Joko Widodo menjadi Politisi	75,5%	Tidak Setuju	Responden peka terhadap keterlibatan keluarga Joko Widodo dalam politik
Rata-Rata		74%	Tidak Setuju (Negatif)	

Sumber: Diolah dari data primer

b. Sikap

Pada aspek sikap, penelitian ini mengukur tingkat sikap mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang terhadap fenomena dinasti politik keluarga mantan Presiden Joko Widodo. Menurut Berkowitz dalam (Azwar, 2007), sikap merupakan evaluasi atau reaksi afektif seseorang terhadap suatu objek atau fenomena, yang dapat berupa perasaan mendukung (favorable) maupun tidak mendukung (unfavorable). Sikap ini mencerminkan kecenderungan individu untuk mendekati atau menjauhi suatu objek, baik secara positif maupun negatif.

Berdasarkan data yang diperoleh, hasil analisis menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki sikap yang sangat kritis dan negatif terhadap dinasti politik. Tabel 18 mengungkapkan bahwa rata-rata sikap responden berada pada angka 77,6%, yang termasuk

dalam kategori Sangat Tidak Setuju. Sebagian besar responden menilai bahwa perubahan batas usia capres dan cawapres serta praktik dinasti politik cenderung menguntungkan pihak tertentu, merusak prinsip keadilan politik, dan menghambat kesempatan pemimpin baru untuk muncul. Mereka juga menyadari bahwa dinasti politik mengutamakan kepentingan keluarga, menghalangi regenerasi kepemimpinan, dan berisiko merusak prinsip-prinsip demokrasi serta meritokrasi. Responden lebih menekankan pentingnya kualitas kandidat dibandingkan dengan latar belakang keluarganya dan menyatakan bahwa visi-misi kepemimpinan seharusnya tidak harus diteruskan oleh keluarga tertentu.

Tabel 18 item-item sikap

No. Item	Pernyataan	Nilai (%)	Kategori	Keterangan
6	Pandangan Responden atas keputusan MK yang mengubah batas usia capres dan cawapres	78,5%	Sangat Tidak Setuju	Menilai perubahan usia menguntungkan pihak tertentu
7	Pandangan Responden terhadap dinasti politik yang mementingkan kepentingan keluarga	78%	Sangat Tidak Setuju	Dinasti politik dianggap mengutamakan kepentingan keluarga
8	Pandangan Responden terhadap dampak dinasti politik yang menghambat kesempatan calon pemimpin baru	76%	Sangat Tidak Setuju	Dinasti politik menghalangi regenerasi kepemimpinan dan meritokrasi
9	Pandangan Responden akan implikasi dinasti politik yang dapat menurunkan prinsip demokrasi	79,5%	Sangat Tidak Setuju	Dinasti politik dianggap mengancam kualitas demokrasi
10	Pandangan Responden akan politik dinasti menciptakan para pemimpin yang tidak berkompeten	73,5%	Tidak Setuju	Pemimpin dinasti dianggap kurang kompeten meski memiliki akses kekuasaan
11	Pandangan Responden	78,5%	Sangat Tidak Setuju	Visi-misi kepemimpinan seharusnya tidak harus

	terhadap dinasti politik digunakan untuk meneruskan visi dan misi kepemimpinan sebelumnya		Setuju	diteruskan oleh keluarga
12	Pandangan Responden perihal memprioritaskan kualitas kandidat dibandingkan dengan latar belakang keluarganya	81%	Sangat Tidak Setuju	Menekankan pentingnya kualitas individu daripada latar belakang keluarga
13	Pandangan Responden terhadap dampak dinasti yang dibentuk mantan Presiden Joko Widodo	76%	Sangat Tidak Setuju	Keterlibatan keluarga mantan presiden dianggap memengaruhi netralitas pemerintahan
Rata-Rata		77,6 %	Sangat Tidak Setuju (Negatif)	

Sumber: Diolah dari data primer

C. Kesadaran

Pada aspek kesadaran, penelitian ini mengukur tingkat kesadaran mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang terhadap fenomena dinasti politik keluarga mantan Presiden Joko Widodo. Kesadaran politik dapat dilihat dari sikap pro atau kontra masyarakat terhadap kebijakan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah (Budiardjo, 2008).

Berdasarkan data yang diperoleh, hasil analisis menunjukkan bahwa mayoritas responden kontra (Tidak Mendukung) dan memiliki kesadaran yang cukup tinggi terhadap dampak negatif dari praktik dinasti politik. Tabel 19 mengungkapkan bahwa rata-rata tingkat kesadaran responden berada pada angka 62%, yang tergolong dalam kategori Tidak Setuju. Responden tidak mengandalkan privilese keluarga untuk meraih posisi politik dan cenderung memilih jalur meritokratis, bahkan sebagian menolak terlibat dalam politik dinasti. Selain itu, sebagian besar responden juga tidak simpatik terhadap keberadaan keluarga Joko Widodo dalam politik, yang mencerminkan kesadaran kritis terhadap ketimpangan akses politik dan kecenderungan nepotisme.

Tabel 19 item-item kesadaran

No. Item	Pernyataan	Nilai (%)	Kategori	Keterangan
15	Pandangan	55%	Tidak	Responden tidak mengandalkan

	Responden Jika Menjadi Salah Satu Anak Politisi		Setuju	privilese keluarga untuk posisi politik
16	Simpatik atau tidak simpatik	69%	Tidak Setuju	Tidak simpatik terhadap keberadaan keluarga Joko Widodo dalam politik
Rata-Rata		62%	Tidak Setuju (Negatif)	

Sumber: Diolah dari data primer

Secara umum, persepsi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang terhadap dinasti politik keluarga mantan Presiden Joko Widodo mencerminkan kecenderungan negatif. Rata-rata persentase keseluruhan aspek pengetahuan, sikap, dan kesadaran menunjukkan kategori Tidak Setuju dengan nilai 71,2%. Mahasiswa menunjukkan pemahaman yang cukup baik terhadap konsep dinasti politik, sikap tegas menolak praktik tersebut sebagai ancaman demokrasi, serta kesadaran terhadap dampak negatifnya dalam kehidupan berbangsa.

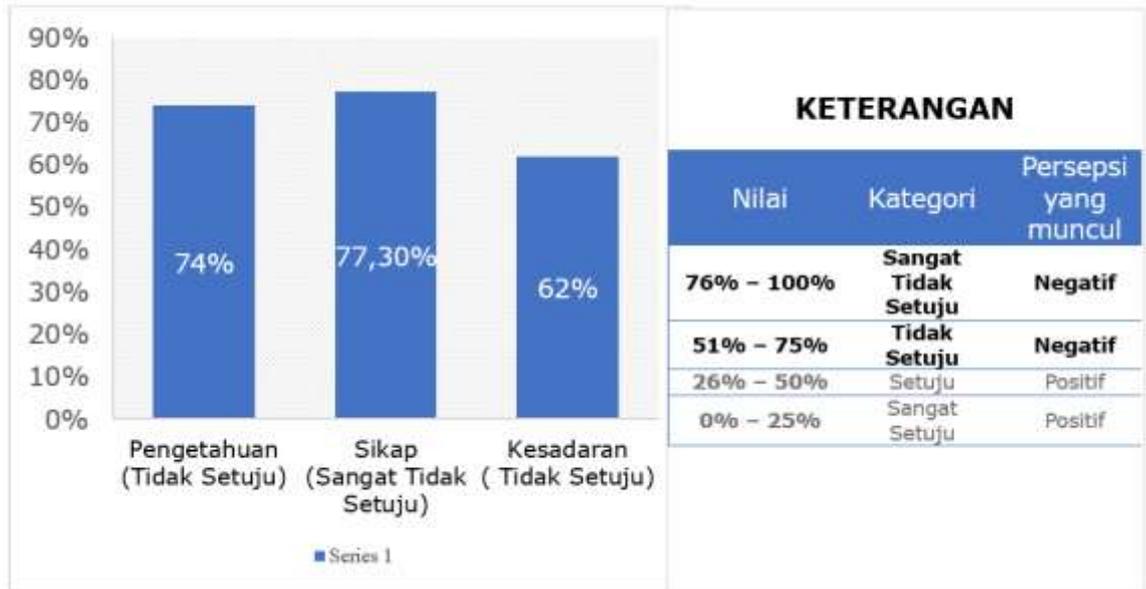
Tabel 20 Aspek Persepsi Responden Terhadap Dinasti Politik Mantan Presiden Joko Widodo

No.	Indikator	Persentase (%)	Kategori	Keterangan
1	Pengetahuan	74%	Tidak Setuju	Responden memahami konsep dinasti politik dan dampaknya
2	Sikap	77,3%	Sangat Tidak Setuju	Responden menolak dinasti sebagai ancaman demokrasi
3	Kesadaran	62%	Tidak Setuju	Responden tidak simpatik dan menyadari dampak negatif dinasti politik
Rata-rata		71,2%	Tidak Setuju	

Sumber: Diolah dari data primer

Dengan demikian, hasil analisis persepsi ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki pandangan yang kritis terhadap fenomena dinasti politik sebagai sesuatu yang berpotensi memperkuat sistem oligarki karena lebih mementingkan kepentingan keluarga daripada kepentingan Bersama yang dapat membuka peluang terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), membatasi atau menghambat kesempatan akses politik bagi calon pemimpin baru, serta berimplikasi pada kemerosotan pelaksanaan prinsip demokrasi.

Grafik 1 indikator Persepsi Responden



Sumber: Diolah dari data primer

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai persepsi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang terhadap dinasti politik keluarga mantan Presiden Joko Widodo, diperoleh rata-rata skor sebesar 71,2%, dikategorikan Tidak Setuju (persepsi negatif). Secara rinci, jika dilihat dari tiga indikator utama yaitu pengetahuan, sikap, dan kesadaran, aspek pengetahuan memperoleh nilai 74% atau dalam kategori Tidak Setuju (negatif), aspek sikap sebesar 77,6% yang masuk kedalam kategori Sangat Tidak Setuju (negatif), dan aspek kesadaran sebesar 62% yang masuk kedalam kategori Tidak Setuju (negatif). Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa memiliki pandangan atau persepsi yang negatif terhadap fenomena atau praktek dinasti politik keluarga mantan Presiden Joko Widodo, dengan kecenderungan sikap kritis terhadap keberlanjutan kekuasaan dalam lingkup keluarga politik. Hal ini mengindikasikan bahwa mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang menilai dinasti politik sebagai sesuatu yang berpotensi menghambat perkembangan demokrasi, memperkuat sistem oligarki, membuka peluang terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta mengurangi kesempatan bagi individu yang lebih kompeten untuk berpartisipasi secara adil dalam sistem politik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, S. (2007). *Sikap manusia: Teori dan pengukurannya*.
- Budiardjo, M. (2003). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia pustaka utama.
- Evangelio, J. V., & Abocejo, F. T. (2015). Political dynasty as perceived by residents of selected villages in Badian, Cebu City, Philippines. *Countryside Development Research Journal*, 3(1), 86-

95.

- Maulana, F., & Patrianti, T. (2023). *Politik Dinasti Atau Dinasti Politik*. Narasi.(2023, 20 Oktober). Putusan MK: Motifnya untuk Melayani Gibran. Diakses pada 18 Agustus 2024, dari <https://narasi.tv/video/mata-najwa/putusan-mk-motifnya-untuk-melayani-gibran>
- Salsabil, S. A., Suparman, M., & Fadilah, A. N. (2022). Persepsi Masyarakat terhadap Dinasti Politik di Provinsi Banten. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 1(01).
- Novryansyah, I. (2022). Kajian Yuridis Terhadap Larangan Politik Dinasti Pemilihan Kepala Daerah (Studi Putusan Mk Nomor 33/Puu-Xiii/2015). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 2(1).
- Panggabean, I. B., & Harahap, A. M. (2024). Perspektif Islam Tentang Dinasti Politik (Studi Kasus Isu Dinasti Politik Tahun 2023-2024). *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 7(2), 1-15.
- Rahma, A. A., Oktaviani, A. A., Hofifah, A., Ahda, T. Z., & Nugraha, R. G. (2022). Pengaruh dinasti politik terhadap perkembangan demokrasi Pancasila di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 2260-2269.
- Suryono, J., Astuti, P. I., Rahayu, N. T., & Hariyanto, H. (2018, December). PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP POLITIK DINASTI DI INDONESIA. In *Seminar Nasional Ilmu Komunikasi Politik 2018* (Vol. 1).
- Bimo Walgito, B. W. (2004). Pengantar Psikologi Umum.